



WARTA SOSEK dan KEBIJAKAN KEHUTANAN

Volume 13 No. 1, Juni 2015

ISSN: 1979-6609

Dari Redaksi

Pada edisi ini disajikan secara tunggal temuan dan rekomendasi dari kerjasama penelitian *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)* periode 2011-2014, di mana Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim - salah satu institusi di Badan Litbang Kehutanan - merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengembangan perhutanan sosial komersial (*community-based commercial forestry/CBCF*) di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan CBCF sebagai strategi ganda untuk menekan kemiskinan masyarakat pedesaan sekaligus membangun industri kehutanan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif besar adalah program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk penyediaan 5,4 juta hektar lahan perhutanan sosial komersial bagi 360.000 keluarga petani hutan pada tahun 2016; juga penyediaan 12,7 juta hektar lahan

untuk berbagai kegiatan perhutanan sosial lainnya. Masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam mengelola lahan hutan sebagai upaya mengurangi kebakaran hutan, konflik lahan, dan aktivitas penebangan hutan ilegal. CBCF diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Penelitian oleh konsorsium Badan Litbang Kehutanan (Bogor dan Makassar), CIFOR, Universitas Gadjah Mada, WWF Indonesia dan beberapa universitas dari Australia (Australian National University, University of Melbourne, dan University of Queensland) membuka pemahaman baru tentang kompleksitas CBCF di Indonesia. Kerjasama penelitian '*Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia*' melibatkan masyarakat dari 10 desa di 5 kabupaten di Indonesia.

Selamat membaca.

TOPIK

Dari Redaksi 1

Memperkuat Perhutanan Sosial Komersial di Indonesia
Temuan dan Rekomendasi Kerjasama Penelitian ACIAR '*Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia*'

[*Enhancing Community-based Commercial Forestry in Indonesia Summary of key findings*] 2



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor; Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id
Website: <http://puspijak.litbang.dephut.go.id> atau www.puspijak.org

Memperkuat Perhutanan Sosial Komersial di Indonesia

Temuan dan Rekomendasi Kerjasama Penelitian ACIAR

'Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia'

[Enhancing Community-based Commercial Forestry in Indonesia
Summary of key findings]

Pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan perhutanan sosial komersial (*community-based commercial forestry/CBCF*) sebagai strategi ganda untuk menekan kemiskinan masyarakat pedesaan sekaligus membangun industri kehutanan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif besar pemerintah adalah program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang menargetkan penyediaan 5,4 juta hektar lahan perhutanan sosial komersial bagi 360.000 keluarga petani hutan pada tahun 2016. Pemerintah juga menargetkan penyediaan 12,7 juta hektar lahan untuk berbagai kegiatan perhutanan sosial lainnya, sehingga masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam mengelola dan menguasai lahan hutan sebagai upaya mengurangi kebakaran hutan, konflik lahan, dan aktivitas penebangan hutan ilegal. CBCF diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tidak dapat dihindari apabila harapan besar terhadap CBCF tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program dan beragamnya kemampuan sumberdaya manusia di tingkat lokal.

Para pengambil kebijakan secara umum memandang penguatan CBCF sebagai strategi agar petani kecil mampu membangun sistem budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan termasuk 'paket' peluang komersialisasi produk perhutanan sosial yang luas dan fleksibel. Meskipun umumnya kegiatan perhutanan sosial skala kecil merupakan bagian integral dalam keluarga petani, misalnya di Jawa berkontribusi hingga 30% terhadap pendapatan petani, mayoritas petani kurang memahami potensi komersial yang lebih dari pohon yang mereka tanam atau kurang memperhatikan spesifikasi kebutuhan pasar sehingga berdampak terhadap kualitas *log* dan nilai yang mereka dapatkan (Irawanti *et al.*, 2014). Ribuan petani kecil mengelola lebih dari 1,5 juta hektar lahan hutan di seluruh Indonesia dengan dua jenis kayu komersial utama yakni jati (*Tectona grandis*, masa tebang 15-30 tahun) dan sengon (*Paraserianthes falcataria*, masa tebang 5-7 tahun).

Penelitian oleh konsorsium Badan Litbang Kehutanan (Bogor dan Makassar), CIFOR, Universitas Gadjah Mada, WWF Indonesia dan beberapa universitas dari Australia (Australian National University, University of Melbourne, dan University of Queensland) membuka pemahaman baru tentang kompleksitas CBCF di Indonesia.

The Indonesian government continues to increase its investment in community-based commercial forestry (CBCF) as a strategy to achieve the twin goals of alleviating rural poverty and building a sustainable forest industry. One of the government's biggest initiatives to support CBCF is the *Hutan Tanaman Rakyat* (HTR) program, which aims to establish 5.4 M ha of commercial forestry with 360,000 farm families by 2016. The government has also recently set a target of establishing 12.7 M ha of more general community-based forestry, so local communities are actively engaged as managers and owners of forests as a strategy to reduce forest fires, land tenure conflict and illegal forest activities. In addition, CBCF is also intended to provide communities with access to forest resources, as another means of improve their welfare. While Indonesia has an ambitious policy goal for CBCF it faces considerable challenges with program implementation and the variable capacity at the local level.

Establishing a vibrant CBCF sector is widely viewed by policy makers as a strategy to assist smallholders build productive and sustainable farming systems that include a diverse and resilient 'package' of commercial opportunities. While small-scale forestry is commonly an integrated component of family farms, for example comprising about 30% of farm income in Java, most smallholders fail to realise the commercial potential of the trees they plant or appreciate the market specifications that impact on log quality and value (Irawanti *et al.* 2014). Thousands of smallholders manage more than 1.5 M ha of planted forests across Indonesia with two of the most important commercial tree species being teak (*Tectona grandis*, grown on 15-30 year rotations) and sengon (*Paraserianthes falcataria*, grown on 5-7 year rotations).

Recent research by a consortium of partners – FORDA Bogor and Makassar, CIFOR, University of Gadjah Mada, WWF Indonesia and several Australian universities (ANU, UMelb and UQ) – has revealed important insights about the complexities of CBCF in Indonesia.

Kerjasama penelitian ‘*Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia*’ melibatkan masyarakat yang berasal dari 10 desa di 5 kabupaten, yakni Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pati (Jawa Tengah), Bulukumba (Sulawesi Selatan), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) [Gambar 1]. Tim peneliti juga bekerjasama dengan institusi lokal, seperti lembaga pemerintahan (misalnya Dinas Kehutanan di Bulukumba) dan LSM (misalnya *Trees4Trees* di Pati). Temuan ini merupakan rangkuman dari rangkaian kegiatan penelitian selama periode 2011-2014, yang merupakan kelanjutan dari kerjasama penelitian ACIAR yang telah dilakukan sejak 2005.

Penelitian ini semakin memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang:

1. Karakteristik sosio-ekonomi dan kombinasi pertanian-kehutanan dalam CBCF di berbagai provinsi (survei dasar yang komprehensif telah dilaksanakan dan dilaporkan dari 10 desa lokasi penelitian);
2. Kekuatan aset (modal) yang dimiliki petani kecil, dengan data yang dibedakan dan dianalisis menurut tingkat kesejahteraan (miskin, sedang, dan kaya).
3. Berbagai jalur pemasaran (rantai nilai) yang digunakan petani kecil dan nilai dari ‘sertifikasi’;
4. Pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan petani kecil tentang pasar produk hasil hutan dan keterampilan silvikultur yang tepat untuk CBCF.

The research project – ‘*Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia*’, was conducted with communities in 10 villages located in five districts: Gunungkidul (Yogyakarta), Pati (Central Java), Bulukumba (South Sulawesi), South Konawe (Southeast Sulawesi) and Sumbawa (East Nusa Tenggara) [see Figure 1]. The consortium also worked closely with important local partners, such as government agencies (e.g. *Dinas Kehutanan* in Bulukumba) and NGOs (e.g. *Trees4Trees* in Pati). The findings summarised in this note are drawn mainly from research conducted during 2011-15, which builds on a longer research interest that has been supported by ACIAR since 2005.

The research has increased understanding of the:

1. Socio-economic and agro-forest characteristics of CBCF across different provinces (comprehensive baseline survey completed and reported from 10 case study villages);
2. Strength of assets (capitals) held by smallholders, with the data disaggregated and analysed across a ‘wealth’ continuum (i.e. the strength of capitals held by smallholders of ‘low-medium-high’ wealth status);
3. Varying market pathways (value chains) utilised by smallholders and the value of ‘certification’; and
4. An approach to enhance smallholders’ knowledge of forest markets and appropriate silviculture skills for CBCF.



Gambar 1. Lokasi penelitian

[Figure 1. District locations of research]

Karakteristik Sosio-Ekonomi dan Kombinasi Pertanian-Kehutanan dari CBCF

Di Indonesia dapat ditemukan berbagai sistem perhutanan sosial dengan berbagai perbedaan dalam tujuan, kepemilikan lahan (pribadi atau milik negara), hutan alam atau hutan tanaman, pendekatan silvikultur, dan jenis produk dan manfaat yang diperoleh petani. Meskipun tiap desa memiliki keunikan warisan sosial-budaya, kondisi ekologi, dan dinamika ekonomi, namun di semua tempat terlihat adanya ketertarikan petani kecil terhadap CBCF. Peluang pengembangan CBCF di Indonesia sangat luas, di mana tingginya permintaan pasar terhadap kayu ditindaklanjuti oleh petani kecil dengan menambah jumlah pohon dalam sistem pertanian mereka (dapat dijumpai di Pati, Bulukumba, dan Konawe Selatan). Namun demikian, keberhasilan pengembangan CBCF di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yakni lemahnya pemahaman petani kecil terhadap dinamika pasar dan teknik silvikultur yang tidak selalu mendukung pemenuhan permintaan pasar; dukungan penyuluhan sering terlalu fokus pada aspek teknis dari silvikultur; kelompok tani setempat memiliki kapasitas organisasional yang terbatas.

Salah satu budaya yang menonjol dalam CBCF adalah bahwa budidaya pohon lebih banyak melibatkan laki-laki daripada perempuan. Kaum laki-laki berperan besar menentukan jenis pohon, melaksanakan penanaman, pemeliharaan, dan proses pemanenan, serta berbagai praktek silvikultur lainnya. Mereka juga lebih aktif terlibat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan dan pertemuan, sebagaimana tradisi yang berlangsung di daerah tersebut. Sementara itu, kaum perempuan lebih berperan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (misalnya mencari pakan ternak) dan aspek keuangan misalnya negosiasi harga dengan pedagang kayu serta berbagai pengelolaan keuangan keluarga lainnya.

Dukungan bantuan terkait CBCF yang diberikan, baik oleh pemerintah maupun LSM umumnya langsung ditujukan pada kelompok tani hutan yang telah ada di desa tersebut, yang anggotanya tentu saja didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian kaum perempuan terlewat dari berbagai informasi pasar dan dukungan yang sangat mungkin dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menegosiasikan harga yang lebih baik dari produk hasil hutannya.

Socio-Economic and Agro-Forest Characteristics of CBCF

There are many types of community forestry systems across Indonesia, with differences in objective, land tenure (private or State land), natural or planted forests, silvicultural approaches, and the products and other benefits farmers receive. While each village has its own unique socio-cultural heritage, ecological condition and economic dynamics, there is generally a strong interest among smallholders to be involved in some form of CBCF. The opportunities for CBCF vary greatly across Indonesia, but where there is strong market demand for timber there is a corresponding trend by smallholders to incorporate additional trees in their farming systems (e.g. in Pati, Bulukumba and Konawe Selatan). However, the successful development of CBCF in Indonesia faces some common challenges, which include: smallholders often have a weak understanding of markets dynamics, and their silviculture does not always relate to market demand; extension support is often too focused on just the technical aspects of silviculture; and local farmer groups can have a limited organisational capacity.

An important cultural dimension to CBCF is that commercial tree production tends to involve more time of the men in the farming household than the women, and men have a greater role in the selection of species, times of planting and harvesting, and the overall silvicultural practices. Men are also more actively involved in community-based activities and meetings, which mainly reflects cultural traditions. Women, on the other hand, have a greater role in harvesting and utilisation of non-wood products from forests (e.g. collecting fodder for livestock) and in financial aspects of wood production, like the negotiation of prices with timber traders, and the overall financial management of the household.

Much of the government and NGO support for CBCF is directed to the existing village-based farmer forest groups, and these groups are predominantly comprised of men. As such, rural women often miss out on receiving commercial information and support that might enhance their ability to negotiate better prices for their family's forest products.

Kekuatan Aset yang Dimiliki oleh Petani Kecil

Berbagai hambatan dan peluang pengembangan CBCF di Indonesia telah secara luas diketahui, namun masih ada kekurangjelasan – dalam terminologi sosial-ekonomi, teknis dan kebijakan – tentang apa yang dimaksud dengan CBCF yang ‘*pro-poor*’. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan cepat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan orang per orang. Namun demikian di banyak wilayah pedesaan, masyarakat kurang merasakan peningkatan kesejahteraan yang dialami di tataran negara, termasuk petani ‘miskin’ yang luput dari peluang mendapatkan keuntungan dari berbagai inisiatif pembangunan desa. Kurang teridentifikasinya berbagai status kesejahteraan petani kecil mempersulit upaya memfokuskan kebijakan dan program yang langsung ditargetkan pada petani kecil yang paling memerlukan yakni mereka yang tergolong sebagai petani ‘miskin’.

Kontribusi hasil hutan (kayu dan non-kayu) dari CBCF terhadap pendapatan keluarga relatif kecil bila diperhitungkan secara mingguan, namun bernilai sangat penting sebagai ‘tabungan’ untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga yang sangat besar dalam jangka pendek. Oleh karena itu, CBCF tetap berperan penting dalam ketahanan keluarga petani. Meskipun demikian, pemanenan berdasarkan kebutuhan yang umum dilakukan oleh keluarga yang perlu uang tunai mungkin tidak tepat dengan waktu pemanenan optimal sehingga petani sering kehilangan peluang mendapatkan keuntungan lebih dari CBCF.

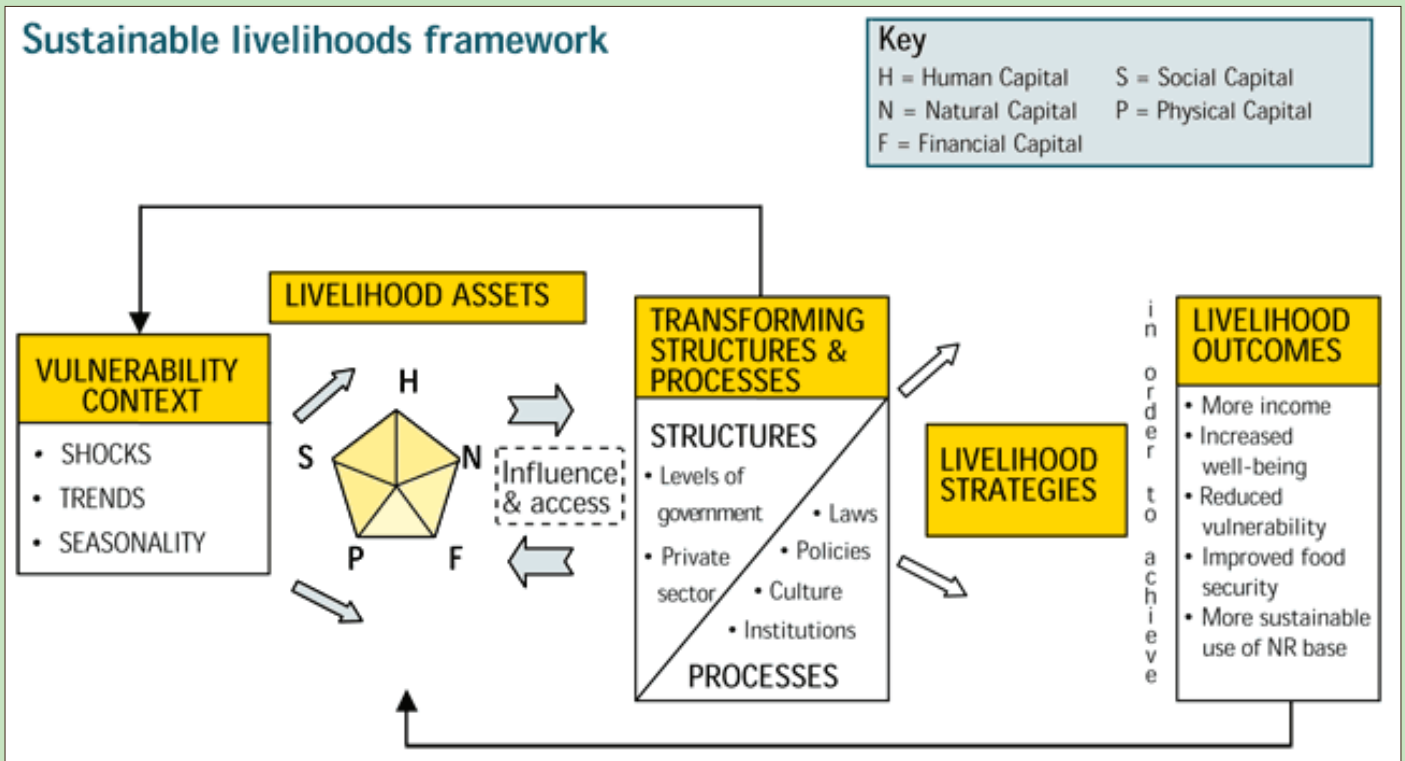
Untuk memahami peran dan kontribusi CBCF terhadap kehidupan petani kecil, penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep penghidupan pedesaan yang meliputi komponen, proses, dan hasilnya. Konsep penghidupan pedesaan yang digunakan adalah ‘...aset (modal alam, fisik, sumberdaya manusia, finansial, dan sosial), aktivitas dan proses sosial-ekonomi serta struktur yang mendukung kehidupan manusia’ (Ellis, 2000). Konsep tersebut disajikan dalam bentuk skema oleh DFID (1999) seperti Gambar 2. Kerangka penghidupan yang berkelanjutan menyediakan langkah yang bermanfaat dalam memahami kompleksitas penghidupan petani kecil.

Strength of Assets Held by Smallholders

The constraints and opportunities for CBCF in Indonesia are broadly known, but there is still a lack of clarity – in socio-economic, technical and policy terms – of what constitutes ‘*pro-poor*’ CBCF. Indonesia has a rapidly developing economy and increasing wealth per capita, yet many in rural communities remain disadvantaged and marginalised from the country’s growing wealth, including ‘*poor*’ smallholders who can miss out on the benefits of rural development initiatives. The lack of clarity about the varying wealth status of smallholders makes it difficult to target policies and programs to enhance the livelihoods of smallholders who need it most – those with the characteristics of ‘*poor*’ smallholders.

The contribution of forest products (timber and non-timber) to the household income is relatively small when considered on an average weekly basis in most CBCF systems, but it plays an important role as a ‘*savings account*’ for meeting household needs that require a large sum of money at short notice. As such, CBCF fulfils a vital role in the resilience of farming households. However, needs-based harvesting of trees, which is commonly practised by households with insufficient cash flow, may not correspond with the optimum timing for commercial timber production and, so smallholders are often missing out on achieving better financial returns from CBCF.

To understand the role and contribution of CBCF to smallholders’ livelihoods, the project more deeply explored the concept of rural livelihoods – the components, processes and outcomes. A useful definition of rural livelihoods is ‘... *the assets (natural, physical, human, financial and social capitals), the activities and socio-economic processes and structures that sustain peoples’ lives*’ (Ellis 2000). This is commonly represented as shown in Figure 2, below (DFID 1999). The sustainable livelihoods framework provides a useful way to understand the complexity of smallholders’ livelihoods.

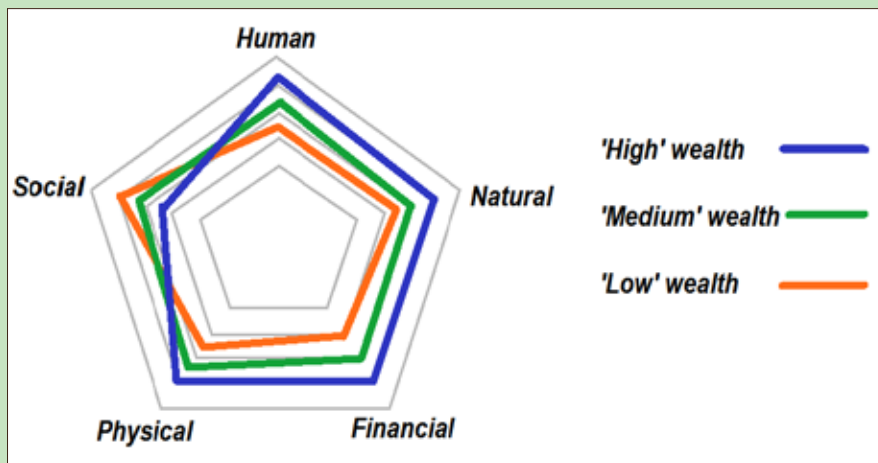


Gambar 2. Kerangka penghidupan berkelanjutan (DFID, 1999)

[Figure 2. Sustainable livelihoods framework (DFID, 1999)]

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pengusahaan CBCF petani 'kaya' umumnya menggunakan modal fisik dan sumberdaya manusia, sementara petani 'sedang' umumnya menggunakan aset fisik dan finansial. Di pihak lain petani 'miskin' lebih mengandalkan modal sosial (misalnya kedekatan hubungan dengan tetangga untuk mendapatkan informasi dan pertukaran tenaga kerja). Juga kayu daur pendek (misalnya sengon) lebih banyak dibudidayakan oleh petani 'miskin' yang lebih memiliki keterbatasan finansial, daripada spesies daur panjang (misalnya jati) meskipun harga jualnya lebih tinggi. Ilustrasi pemanfaatan aset dalam pengusahaan CBCF oleh petani pada berbagai tingkat 'kesejahteraan' dapat dilihat pada Gambar 3.

This research found that in terms of CBCF, 'high' wealth farmers mostly used physical and human capitals, while farmers of 'medium' wealth used mostly physical and financial assets. In contrast, 'low' wealth farmers relied more on their social capital for undertaking CBCF (e.g. close relationships with their peers for information and labour exchange). Also, short-rotation forest crops (e.g. albizia) often have more appeal to 'low' wealth farmers who have few financial reserves, rather than long-rotation species (e.g. teak) even if these may ultimately be of higher commercial value. Understanding the strength of different assets among smallholders in a village can assist design of effective support programs. An example of how the assets can be illustrated for the different 'wealth' levels at a village is shown in Figure 3, below.



Gambar 3. Contoh kekuatan penggunaan aset pada berbagai tingkat kesejahteraan petani

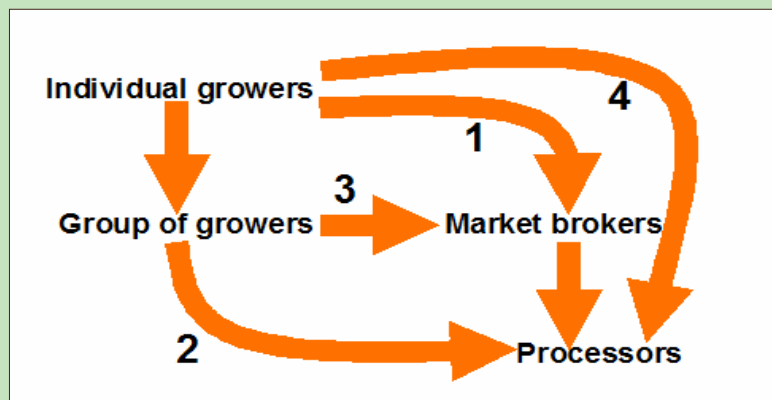
[Figure 3. Example of strength of assets for different wealth levels among smallholders.]

Berbagai Jalur Pemasaran yang Digunakan Petani Kecil

Petani kecil memanfaatkan berbagai jalur pemasaran atau rantai nilai dalam penjualan hasil hutannya. Berbagai jalur tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan di mana tiap jalur menarik bagi petani dalam kondisi yang berbeda (Gambar 4). Jalur pemasaran yang paling umum bagi petani kecil yang menjual pohon 'berdiri' adalah melalui pedagang kayu (perantara) [#1]. Petani juga dapat bergabung dengan petani lain dan menjual kayunya melalui kelompok tani atau koperasi [#2] yang selanjutnya menjualnya pada pedagang kayu [#3] atau langsung ke pabrik pengolahan kayu [#4]. Di satu lokasi bahkan dapat ditemukan beberapa jalur pemasaran yang beroperasi bersamaan – menyediakan keuntungan pada petani kecil dalam kondisi yang berbeda-beda.

Market Pathways Used by Smallholders

Smallholders use a variety of different market pathways, or value chains, to sell their forest products. All market pathways of CBCF offer advantages and limitations, with each pathway appealing to smallholders in different circumstances [see Figure 4]. The most common market pathway for smallholders with commercial timber is to sell their trees 'standing' to market brokers (middlemen) [#1]. However, smallholders can aggregate their resource and sell via a growers' cooperative [#2], via a growers' cooperative that in turn sells to a market broker [#3], or sell directly to processors [#4]. Even within a single locality, there may be several market pathways operating simultaneously – providing benefits for smallholders in different circumstances.



Gambar 4. Jalur pemasaran kayu yang digunakan petani

[Figure 4. Common market pathways used by smallholders to sell timber, Indonesia.]

Profitabilitas, biaya investasi dan risiko di tiap tingkatan jalur pemasaran penting diketahui dan dipahami, mengingat hal tersebut tidak selalu diharapkan atau layak bagi petani kecil untuk terlibat dalam tahap pemanenan atau pengolahan kayu. Pemahaman sederhana tentang berapa harga yang dibayarkan atau diterima pada setiap tingkatan rantai nilai belum tentu menjadi indikator yang akurat tentang besarnya keuntungan yang diperoleh pada tingkatan tersebut. Meskipun informasi tentang harga *log* mudah diperoleh, penelitian ini tidak menemukan indikator pengukuran kayu yang universal (misalnya dalam hal kualitas dan ukuran) sehingga sulit untuk membandingkan 'nilai' *log* antar lokasi.

Penyumbang utama pendapatan keluarga petani secara umum bukan berasal dari produksi kayu komersial namun berasal dari usaha ternak (kambing), pertanian tanaman semusim (jagung, ketela pohon), dan berbagai tanaman pangan lainnya atau hasil perkebunan (kopi, cengkeh).

It is important to understand the profitability, capital investment and risk derived at each stage in the market pathway, as it is not always desirable or feasible for smallholders to be involved in the harvesting or processing stages of the forestry sector. Simply understanding the prices paid, or received, at each stage of the value chain does not necessarily give an accurate indication of profitability for those involved. While information on log prices is relatively easy to obtain, the research found no universal indices for log measurement (i.e. quality, size) in the study regions, making it difficult to compare log 'values'.

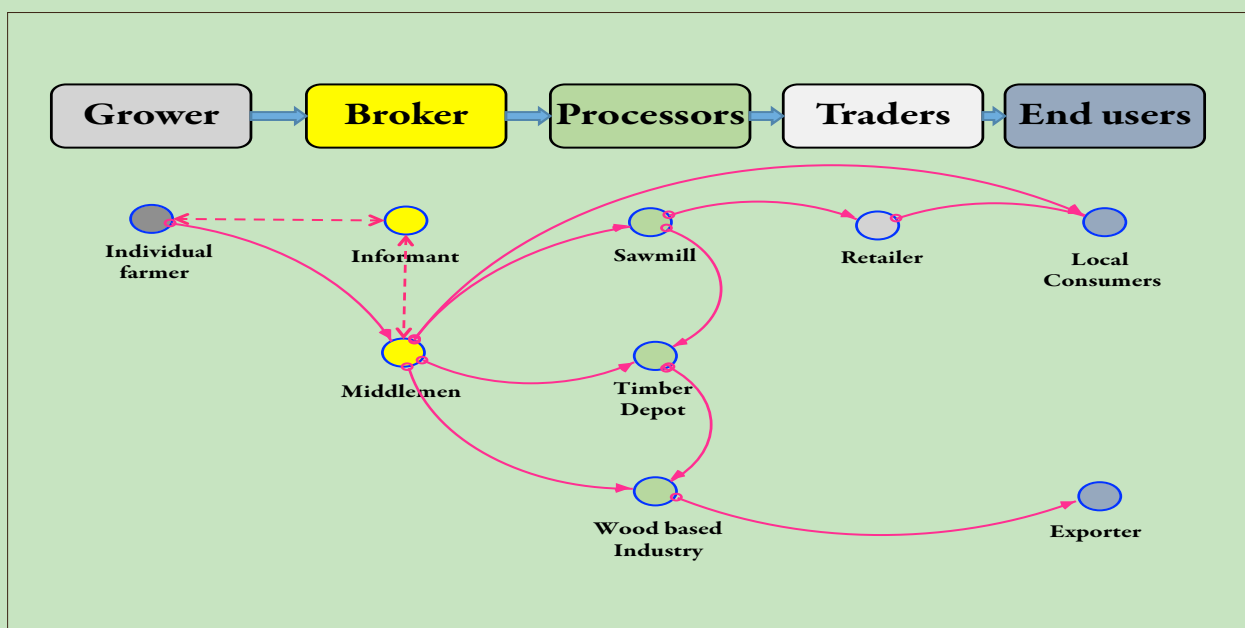
Commercial forest production is generally not the largest contributor to the household income of farmers, which is commonly by cattle, goats, corn, cassava and other secondary food or estate crops.

Tentu saja petani dapat menjual kayunya kapanpun ‘karena kebutuhan’ sehingga pemahaman detil pasar kayu komersial dan jalur pemasarannya menjadi kurang penting. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila petani menjual kayu langsung ke pedagang lokal yang tinggal di desa tersebut atau desa tetangga karena pedagang tersebut yang memiliki jaringan bisnis ke pasar regional atau nasional atau industri pengolahan. Hal inilah yang menjadikan petani hanya dapat menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang lokal.

Sesungguhnya petani kecil masih memiliki peluang mendapat keuntungan lebih apabila mereka menggabungkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien agar memenuhi batas minimal sebelum menjualnya ke industri pengolahan (melalui jalur pemasaran: petani - kelompok tani - industri pengolahan). Hal tersebut terjadi karena adanya kekuatan potensial yang dimiliki kelompok tani atau koperasi untuk menegosiasikan pemasaran langsung dengan industri pengolahan, kapasitas kelompok dalam memahami pasar kayu lokal dan regional (misalnya dalam hal spesifikasi kayu dan harga) sehingga dapat menegosiasikan harga yang adil, dan kapasitas kelompok untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi kayu. Jalur pemasaran ini ditemukan di Pati di mana terjadi peningkatan produksi sengon, dan karena daurnya yang lebih pendek (5-7 tahun) daripada daur jati (15-20 tahun), dan telah menjadi sumber pendapatan yang penting bagi keluarga petani. Selain jalur pemasaran tersebut di Pati juga dapat dijumpai berbagai jalur pemasaran yang digunakan petani untuk menjual kayunya (Gambar 5).

As such, smallholders may sell timber infrequently on an ‘as needed’ basis – with little imperative to gain a detailed understanding of commercial timber markets and alternate market pathways. It is understandable that in such situations growers sell their trees directly to a local broker who lives in or near the village and who has business connections to larger regional or national markets or processing industries. However, this can lead to farmers being highly dependent on the prices offered by the local broker.

Nonetheless, there appear some advantages for small-scale growers to aggregate their resource to efficiently achieve a critical mass before selling to a processor (i.e. market pathway comprised of: grower-growers’ cooperative-processor). The main reasons are the potential strength of a growers’ cooperative or group in developing direct marketing arrangements with a processor, the capacity of a group to understand local and regional wood markets (e.g. timber specifications and prices) so as to be able to negotiate fair prices, and the capacity of a group to participate in the certification process for timber. This market pathway is emerging in Pati where the production of sengon is increasing and, due to its shorter growth duration (5-7 years) compared to teak (15-30 years), is becoming a regular and substantial source of income for smallholders. Yet even in Pati, where there is growing demand for timber grown by smallholders, there are several market pathways used by smallholders [see Figure 5].



Gambar 5. Jalur pemasaran kayu yang digunakan oleh petani kecil di Pati

[Figure 5. Market pathways used by smallholders in Pati, Indonesia]

Meskipun berbagai jalur pemasaran yang digunakan petani telah banyak diketahui, namun akses pasar oleh kebanyakan petani masih sangat ditentukan oleh jaringan sosial yang dimilikinya, yang tidak selalu dibangun untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Lebih lanjut, jaringan sosial petani 'kaya' cenderung berbeda dengan yang dimiliki petani 'miskin' meskipun mereka tinggal di desa yang sama. Bagaimana mengoptimalkan berbagai jalur pemasaran dengan karakteristik petani yang berbeda-beda masih perlu dipahami lebih lanjut.

Sertifikasi sukarela¹ (auditor independen melakukan verifikasi atas keberlanjutan sosial-ekonomi dan lingkungan dari praktek dan produksi kehutanan) merupakan strategi terbaru untuk mendorong perubahan dalam kehutanan, dengan harapan petani dan industri pengolahan mendapat insentif berupa pendapatan yang lebih tinggi dari sertifikasi. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya peningkatan harga kayu bulat sebesar 10-30% dari harga kayu tanpa sertifikasi. Namun demikian pasar kayu yang bersertifikat masih kecil dan terbatas (misalnya hanya untuk kayu berdiameter besar dan berkualitas bagus) dibandingkan dengan pasar kayu pada umumnya. Penelitian juga memperlihatkan adanya peningkatan harga produk olahan dari kayu yang bersertifikat sebesar 5%.

Tantangan terbesar bagi petani kecil dalam sertifikasi adalah prosesnya yang kompleks dan membutuhkan biaya besar. Hingga saat ini pasokan kayu bersertifikat dari petani kecil umumnya didukung oleh industri pengolahan yang membiayai dan memfasiliasi prosesnya dalam rangka mendapatkan akses pasar produk 'bersertifikat' dan membangun citra perusahaan yang positif.

Peningkatan Pengetahuan Petani Kecil Mengenai Pasar dan Silvikultur

Banyak penelitian menegaskan bahwa petani kecil memandang CBCF sebagai 'tabungan' dan melakukan pemanenan kapanpun saat mereka perlu dan seringkali memutuskan untuk menjual kayu dalam waktu singkat. Dampaknya, tanaman dibiarkan tumbuh tanpa pemeliharaan yang diperlukan (pemangkasan dan penjarangan) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kayu.

¹ Sertifikasi sukarela (misalnya FSC, LEI) berbeda dengan skema sertifikasi wajib 'SVLK' yang dikembangkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal.

While the market pathways used by smallholders are broadly understood, access to markets for many smallholders is still largely determined by their local social networks, which are not necessarily constructed for optimum business transactions. Furthermore, the social networks of 'wealthy' smallholders tend to be different to those of 'poor' smallholders, even when living in the same village. How to optimise the different market pathways that smallholders use to sell their commercial forest products remains to be fully understood.

Voluntary market-based forest certification¹ (where independent auditors can verify the socio-economic and environmental sustainability of forestry practices and products) has been a recent strategy to encourage a shift in forestry, with the expectation of higher market returns an incentive for growers and processors who achieve certification. This research found some evidence that certified timber had attracted prices 10-30% higher prices for logs at log yards for growers than uncertified timber. Yet the market for certified timber was small and specialised (e.g. usually requiring logs of large size and high quality), compared the wider forest market. There was also evidence that products manufactured with certified timber were receiving prices 5% higher than comparable products without certified timber.

The biggest challenge for smallholders before they make a greater investment in certified forestry is that it is a complex and expensive process for them to comply with, largely unaffordable to most small-scale growers. To date, the supply of certified timber from smallholders is largely due to the costs being covered by manufacturers seeking to maintain access to 'certified' markets and develop a positive corporate image.

Enhancing Smallholders' Knowledge of Forest Markets and Silviculture

Much research, by this project and others, has confirmed that most smallholders tend to view CBCF as a 'savings account' and harvest their trees when needed, often deciding to sell trees at short notice. In effect, the trees planted by smallholders are left to grow without any of the active management (thinning and pruning) required to enhance the quality or quantity of the timber produced.

¹ The voluntary market-based forest certification (e.g. FSC, LEI) is different to the mandatory 'SVLK' certification scheme introduced by the Indonesian government to arrest the illegal forest trade.

Keputusan menjual kayu mengabaikan potensi jangka panjang kayu dan dinamika pasar, di mana petani menerima begitu saja harga yang diberikan oleh pedagang lokal (perantara). Petani biasa menjual pohon yang bervariasi umur dan kualitasnya dalam satu transaksi dan menerima harga yang tidak terlalu tinggi dari pedagang.

Petani terbiasa mengadopsi praktek silvikultur yang diterapkan oleh tetangganya tanpa memperhatikan standar yang diperlukan oleh industri pengolahan. Proyek ini mendesain dan menyelenggarakan pelatihan penyuluhan kehutanan model baru kepada lebih dari 120 petani melalui '*Master Tree Grower (MTG) Indonesia*'. Program pelatihan difokuskan pada upaya membangun pemahaman petani terhadap spesifikasi kayu yang diperlukan pasar, pertumbuhan pohon dan pilihan pengelolannya, dan mengeksplorasi pilihan pengelolaan secara komersial sesuai dengan kepentingan dan sumberdaya masing-masing petani. Para peserta pelatihan dibawa ke industri pengolahan lokal agar mendapatkan pemahaman tentang tuntutan pasar dan rantai nilai dari kayu yang ditanam. Pengetahuan ini kemudian dikaitkan dengan praktik silvikultur yang diperlukan untuk menghasilkan kayu berkualitas sesuai tuntutan pasar dan lebih lanjut diharapkan membawa peningkatan pendapatan para petani.

Perintisan '*MTG Indonesia*' sebagai model penyuluhan dan pendidikan bagi petani merupakan suatu kebaruan karena bukan merupakan upaya 'melatih' petani agar mengadopsi dan mereplikasi praktek silvikultur yang diterapkan oleh kehutanan industri atau pemerintah.

Sebagaimana telah diungkapkan dari penelitian sebelumnya bahwa tujuan menanam pohon, sumberdaya dan pengetahuan yang dimiliki petani dan kalangan industri kehutanan adalah sangat berbeda. Rintisan pelatihan '*MTG Indonesia*' meliputi lima pokok bahasan yakni *review* terhadap minat pemilik lahan dalam menanam pohon, eksplorasi berbagai peluang pasar lokal, pelatihan pengukuran pohon dan hutan, pembelajaran tentang pertumbuhan pohon dan pengelolaan hutan, serta diskusi mengenai kebutuhan akan informasi dan bantuan lebih lanjut. Pelatihan juga ditujukan untuk mendorong petani agar membagikan pengalaman dan pengetahuannya serta memperkuat jaringan pribadi-mendorong kepercayaan diri yang lebih besar antar petani untuk mengeksplorasi jalur pemasaran baru.

The decision to sell trees is generally made irrespective of the trees' longer term potential or the market dynamics, with smallholders usually accepting whatever price is offered by the local broker (middlemen). It is common for smallholders to sell trees of variable age and quality within a single transaction, and subsequently receive modest prices from brokers or processors.

Smallholders often adopt silvicultural practices acquired from their neighbours, and follow these regardless of the preferences of processors. This project designed and delivered a novel forestry extension course to over 120 smallholders – the '*Master Tree Grower (MTG) Indonesia*' initiative. The program focused on developing farmers' understanding of timber market specifications, tree growth and management options, and exploring commercial management options that reflect their particular interests and resources. The participants were taken to local timber processors to gain a better understanding market requirements and the marketing chains. This understanding was then linked to silvicultural practices designed to produce the quality of timber in demand by their local markets with the expectation that this would lead to better financial returns to smallholders.

The pilot '*MTG Indonesia*' approach to farmer education and extension is novel in that it does not set out to 'train' smallholders about how to adopt and replicate the silviculture practices used by industrial or government forestry.

As demonstrated by the previous research, the tree growing objectives, resources and knowledge of smallholders and industrial foresters are very different. The pilot '*MTG Indonesia*' course covered a consistent 5-part structure that included a review of landholder interests in tree growing, exploration of local market opportunities, training in tree and forest measurement, education in tree growth and forest management, and discussion of future information and support needs. The course also aimed to encourage smallholders to share their experiences and consolidate their personal networks – encouraging a greater confidence among smallholders to explore new market pathways.



Rekomendasi

1. Diperlukan peningkatan pemahaman terhadap karakteristik sosial-ekonomi dan pertanian-kehutanan di tingkat kabupaten, dan menggunakan pemahaman ini untuk mendesain berbagai program yang mendukung CBCF. Sebagai contoh, penggunaan ‘kerangka penghidupan berkelanjutan’ untuk menilai dan mengukur aset dari berbagai petani kecil dan berbagai proses eksternal yang memengaruhi kehidupan mereka, dan bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi kecenderungan mereka terhadap CBCF (misalnya apakah spesies kayu daur pendek lebih menarik bagi petani ‘miskin’ karena akan menyediakan aliran dana tunai yang lebih cepat daripada spesies daur panjang).
2. Diperlukan desain bantuan program khusus untuk menyesuaikan dengan berbagai minat dalam CBCF. Sebagai contoh, membangun kapasitas penyuluhan di daerah sehingga memiliki berbagai keahlian (misalnya, bagaimana tanaman kayu dapat diintegrasikan dengan tanaman pertanian? Bagaimana berbagai pilihan praktik silvikultur dapat dikaitkan dengan tuntutan pasar? Pembangunan kapasitas apa yang paling diperlukan kelompok tani? Pelatihan finansial apa yang dapat diberikan kepada wanita tani terkait keterlibatannya dalam CBCF?).
3. Diperlukan peningkatan pemahaman tentang berbagai jalur pemasaran yang beroperasi di daerah dan mengkaji pilihan mana yang sesuai untuk masing-masing petani. Sebagai contoh, para penyuluh dapat menyediakan informasi terkini secara reguler kepada petani tentang berbagai jalur pemasaran yang ada di daerah mereka (misalnya poster yang berisi ilustrasi berbagai pilihan pasar dapat disajikan dan didiskusikan di tiap desa, penyuluh kehutanan dapat mendorong petani untuk berbagai pengalaman pemasaran kayu mereka).

Recommendations

1. Increase understanding of the socio-economic and agro-forest characteristics at the district level, and use this understanding to design effective support programs. For example, use the ‘sustainable livelihood framework’ to assess and measure the assets for different smallholders and the external processes impacting on their lives, and how these combine to influence their preferences for CBCF (e.g. do short-rotation species have more appeal for ‘low’ wealth farmers because they will provide cash flow more quickly than long-rotation species).
2. Design support programs that are tailored to the different interests in CBCF. For example, build the capacity of regional extension services so that a range of expertise is available for a mix of smallholders to access (e.g. how timber species can be integrated with agricultural crops? how do different silvicultural options link to market requirements? what capacity building do farmer groups most need? what financial training about CBCF can be given to farm women?).
3. Increase understanding of the multiple market pathways that operate at the district level, and explore the options that suit different smallholders. For example, extension agents could provide regular and up-to-date information to smallholders about the different market pathways available in their district (e.g. an illustrated poster explaining the different market options in local area could be displayed and discussed in each village, extension agents could encourage smallholders to share their market experiences).

4. Diperlukan pengkajian pilihan untuk meringkas persyaratan agar skema sertifikasi hutan dapat terjangkau oleh petani. Sebagai contoh, pemerintah perlu membangun proses yang jelas dan sederhana untuk melibatkan petani dalam skema sertifikasi hutan (misalnya poster yang berisi ilustrasi tentang berbagai pilihan sertifikasi hutan dan persyaratannya dapat disajikan dan didiskusikan di tiap desa; penyuluh kehutanan dapat menginisiasi proses pengumpulan dan pembakuan pelaporan bagi petani kecil untuk berpartisipasi dalam skema sertifikasi hutan).
5. Diperlukan peningkatan pemahaman terhadap dinamika pasar di tingkat daerah dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyampaikan berbagai metode silvikultur yang dapat dipraktikkan petani. Sebagai contoh, penyuluh kehutanan dapat mendampingi petani kecil untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai persyaratan pasar dan tren yang terjadi serta bagaimana kondisi tersebut memengaruhi praktik silvikultur (misalnya penyuluh kehutanan dapat memperkuat pemahaman petani kecil tentang pasar lokal dan berbagai pilihan silvikultur; berbagai lembaga yang mendukung CBCF perlu mengadaptasi dan memperluas penyebaran pelatihan 'MTG Indonesia' bagi petani kecil yang berminat dalam CBCF; penyuluh kehutanan perlu disadarkan tentang tujuan dan metode khusus dari 'MTG Indonesia').
4. Explore options for streamlining the requirements for smallholders to be involved in affordable forest certification schemes. For example, a clear and simplified process for smallholders to be involved in forest certification schemes should be developed by the government's agencies at the district level (e.g. an illustrated poster explaining the different forest certification options and requirements could be displayed and discussed in each village; extension agents could initiate a process to collate and standardise the reporting for smallholders to participate in forest certification schemes).
5. Increase understanding of market dynamics at the district level, and use this understanding to inform the silviculture practiced by smallholders. For example, extension agents should assist smallholders to increase their understanding of different market requirements and trends, and how these options relate to their silvicultural practices (e.g. extension agents should strengthen smallholders understanding of the local market and the different silvicultural options; organisations supporting CBCF should consider adapting and expanding the delivery of the 'MTG Indonesia' course to smallholders interested in CBCF; forestry extension agents should be made aware of the purpose and design of the 'MTG Indonesia' course).



Warta Sosek dan Kebijakan Kehutanan

Penanggung Jawab:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Dewan Redaksi:

1. Ir. Achmad Pribadi, M.Sc.
2. Drs. Haryono
3. Bintoro, S.Kom

Sekretariat:

1. Bayu Subekti, SIP, M.Hum.
2. Ratna Widyaningsih, S.Kom.
3. Agus Purwanto, A.Md.

Redaksi menerima naskah berupa tulisan populer/semi ilmiah meliputi kajian kebijakan kehutanan atau kajian aspek sosial ekonomi kehutanan, ditulis dengan huruf Times New Roman, dengan Font 11 dan spasi satu. Redaksi berhak menyempurnakan/mengedit kandungan dan layout naskah. Naskah dapat dikirim ke Sekretariat Redaksi Warta Sosek dan Kebijakan Kehutanan melalui e-mail Publikasipuspijak@yahoo.co.id atau ke alamat redaksi Sub Bidang Data, Informasi dan Diseminasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Telp.: (0251) 8633944, Facs.: (0251) 8634924